

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Konstitusi Press, 2005;
- . *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005;
- A. Mukthie Fadjar, dalam Jimly Asshidiqie dan Para Pakar Hukum, *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, The Biography Institute, Jakarta, 2007;
- Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-Undangan di Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1991;
- B. Arief Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, terjemahan, Refika Aditama, Bandung, 2007;
- Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan menurut UUD 1945*, Liberty, Yogyakarta, 1993;
- I Gede Pantja Astawa dalam Ateng Syafrudin, *Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996;
- Imam Soebechi, *Judicial Review Perda Pajak Dan Retribusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012;
- Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia-Makna Kedudukan dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press Citra Media, Jakarta-Yogyakarta, 2006;
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, , Cetakan Ketiga, Jakarta, 2010;
- Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Cet. 13, Kansius Yogyakarta, 2012;

- Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990;
- Rachmat Trijono, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2013;
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980;
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1985;
- Soimin. *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Negara di Indonesia*. UII Press, Yogyakarta, 2010;
- Sarman dan Mohamad Taopik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2011;
- Trianto & Titik Triwulan, *Falsafah Negara dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta., 2007;

B. Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Secara Lengkap (Pertama 1999 - Keempat 2002), Sinar Grafika, Jakarta, 2002;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

C. Sumber Lain

- Attamimi, A. Hamid S., *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia*, disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990;
- Emerson Yuntho, *Panduan Public Review (Eksaminasi Publik Peraturan Perundangan)*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2012;
- <http://jateng.metrotvnews.com/read/2016/01/30/476966/dapat-laporan-3000-perda-bermasalah-presiden-jokowi-geram>, dikutip tanggal 15 Mei 2016;
- <https://eprints.uns.ac.id/7995/1/139721108201009431.pdf>, glm. 4, dikutip tanggal 11 Agustus 2016.;
- <http://www.transaktual.com/fullpost/politik-hukum/1466705061/kemendagri-rilis-daftar-perda-dan-permendagri-yang-dibatalkan.html>, dikutip tanggal 20 Agustus 2016.
- Indra Z Rayusman, dkk, *Hubungan Program Legislasi Daerah Dengan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan*, Jurnal Kebijakan dan Pembangunan, Vol. 1 No. 1 29-53, Program Pascasarjana, Universitas Lampung, 2014;
- M. Laica Marzuki, *Hakekat Desentralisasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Majalah Mahkamah Konstitusi RI, Volume 4 Nomor 1 Maret 2007.